

## Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2024

Nabila All Anjari<sup>1</sup>, Ana Nafisatin Ilma<sup>2\*</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3</sup>, Revienda Anita Fitri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

### Abstrak

Fokus utama riset ini adalah untuk mengevaluasi dinamika serta peranan pajak dari sektor wisata dalam menyumbang bagi PAD Kota Surabaya antara tahun 2021-2024, ditinjau dari perspektif otonomi keuangan daerah. Studi ini menerapkan metodologi deskriptif dengan meninjau berbagai literatur terkait, serta menganalisis data sekunder yang bersumber langsung dari laporan finansial pemerintah daerah. Temuan riset mengonfirmasi adanya lonjakan besar pada setoran pajak pariwisata terdiri dari pajak reklame, parkir, hiburan, restoran, dan hotel yang semula berada di angka Rp67,5 miliar pada tahun 2021 meningkat hingga menyentuh kisaran Rp1,54 triliun di tahun 2024. Andil sektor wisata terhadap total PAD Surabaya pun turut membaik, di mana persentasenya yang semula hanya 14,37% (level rendah) di tahun 2021 merangkak naik menuju angka 25% (level sedang) pada penghujung 2024. Hasil studi mengonfirmasi bahwa industri pariwisata memegang fungsi krusial bagi akselerasi bangkitnya ekonomi lokal dan peningkatan kemandirian anggaran di Kota Surabaya.

**Kata Kunci:** Pajak Pariwisata; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Desentralisasi Fiskal; Pajak Daerah.

### Abstract

*The primary focus of this research is to evaluate the dynamics and the role of tourism sector taxes in contributing to Surabaya City's Local Revenue between 2021 and 2024, from the perspective of local financial autonomy. This study employs a descriptive methodology by reviewing relevant literature and analyzing secondary data sourced directly from local government financial reports. The research findings confirm a significant surge in tourism tax revenues, comprising taxes on advertising, parking, entertainment, restaurants, and hotels, which rose from Rp67.5 billion in 2021 to reach approximately Rp1.54 trillion in 2024. The tourism sector's contribution to Surabaya's total local revenue has also improved, with its share which was only 14.37% (low level) in 2021 climbing to 25% (moderate level) by the end of 2024. The study's findings confirm that the tourism industry plays a crucial role in accelerating the recovery of the local economy and enhancing budget self-reliance in the City of Surabaya.*

**Keywords:** Tourism Tax; Local Revenue (PAD); Fiscal Decentralization; Local Tax.

Korespondensi:

Ana Nafisatin Ilma  
(25040674211@mhs.unesa.ac.id)

Submit: 28-01-2026

Revisi: 25-04-2026

Diterima: 08-05-2026

Terbit: 18-05-2026

## 1. Pendahuluan

Lewat diterapkannya otonomi daerah, otoritas di tingkat lokal kini menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengarahkan serta mengelola sumber daya finansial mereka sendiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai kekuatan ekonomi lokal, mencakup pungutan pajak dan restribusi daerah, keuntungan dari aset daerah, serta pemasukan legal lainnya yang diatur secara hukum. PAD berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah terhadap ketergantungan pada pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah menjadi komponen dominan dalam PAD yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber

pembiayaan (budgeter), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (regulerend) dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal (Bird & Vaillancourt, 2006). Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, bidang pariwisata diidentifikasi sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat potensial untuk meningkatkan jumlah pemasukan pemerintah daerah. Industri pariwisata tidak sekedar berperan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui eskalasi pendapatan riil masyarakat, namun juga mampu menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang menstimulasi ekspansi unit usaha dan diversifikasi lapangan pekerjaan (Yoeti, 2008). Industri pariwisata menjadi motor penggerak bagi kemajuan berbagai lini usaha penunjang, mulai dari penyediaan akomodasi dan kuliner hingga layanan periklanan serta perparkiran, yang semuanya merupakan sumber utama pungutan pajak bagi daerah. Pajak-pajak tersebut dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kerangka teoretis, desentralisasi fiskal memandatkan otoritas lokal untuk mengatur sumber daya keuangannya secara mandiri. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan kualitas layanan publik, menjamin transparansi pemerintahan, dan menaikkan standar hidup warga setempat (Oates, 1993 ; Rondinelli & Cheema, 1983). Dalam hal ini, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menjadi indikator penting dalam menilai peran sektor ekonomi terhadap kapasitas fiskal daerah (Mahmudi, 2010). Semakin besar kontribusi pajak terhadap PAD, kondisi tersebut memperkuat kapasitas finansial pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan secara otonom. Sejumlah studi sebelumnya telah membuktikan bahwa pendapatan dari sektor perhotelan dan rumah makan memberikan sumbangsih yang berarti bagi total PAD di kawasan urban. Selain itu, sektor pariwisata juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah melalui aktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Penelitian oleh Sari dan Putra (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD di daerah perkotaan. Penelitian lain oleh Pratama (2022) mengemukakan bahwa dunia pariwisata berperan penting dalam mendorong pemasukan pajak daerah lewat berbagai aktivitas ekonomi sekunder yang tercipta di sekitarnya. Selain itu, studi oleh Rahmawati (2023) menegaskan bahwa pemulihan sektor pariwisata pascapandemi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor jasa. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada analisis parsial atau pada wilayah tertentu dan belum secara spesifik mengkaji kontribusi pajak sektor pariwisata secara komprehensif pada tingkat kota metropolitan dalam periode pemulihan ekonomi pascapandemi.

Data di lapangan menggambarkan Surabaya sebagai pusat kota metropolitan yang mencatatkan pertumbuhan masif di bidang perdagangan dan jasa, dengan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utamanya. Eskalasi jumlah fasilitas penginapan, tempat makan, dan lokasi rekreasi secara langsung memperluas basis pajak daerah, terutama yang bersumber dari pajak reklame, parkir, serta usaha hiburan dan kuliner. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), sektor pariwisata menunjukkan tren pemulihan yang signifikan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Periode 2021–2024 menjadi fase penting karena merupakan masa transisi menuju pemulihan ekonomi daerah yang secara langsung memengaruhi dinamika penerimaan pajak sektor pariwisata.

Walaupun demikian, masih terdapat kelangkaan studi yang membedah secara mendalam tentang dinamika dan andil pajak sektor wisata bagi PAD Surabaya selama masa transisi setelah pandemi. Kekosongan literatur ini menjadi celah riset (research gap) yang krusial untuk segera ditindaklanjuti melalui analisis empiris berbasis data terkini pada level pemerintah kota. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran sektor pariwisata dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.

Merujuk pada pemaparan tadi, riset ini dilakukan dengan maksud mengevaluasi tren setoran pajak pariwisata di Surabaya dalam kurun 2021–2024, serta memetakan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan PAD di periode tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan publik, khususnya terkait optimalisasi pajak daerah, serta

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak sektor pariwisata.

## 2. Metode

Studi ini menerapkan metodologi deskriptif kuantitatif dengan maksud untuk memetakan dan mengevaluasi sejauh mana pajak dari sektor pariwisata menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya sepanjang tahun 2021-2024. Pemilihan pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan yang terstruktur dan nyata terkait tren penerimaan pajak daerah dengan merujuk pada ketersediaan data yang ada.

Fokus utama objek kajian ini mencakup berbagai jenis pungutan pajak di bidang pariwisata Surabaya, seperti pajak dari hotel, rumah makan, tempat rekreasi, iklan luar ruang (reklame), dan area parkir. Rentang waktu penelitian dibatasi dari tahun 2021 sampai 2024, sebuah periode yang krusial karena bertepatan dengan upaya pemulihan kondisi ekonomi pasca-wabah Covid-19.

Sumber data yang diolah bersifat sekunder, yang dikumpulkan dari otoritas berwenang termasuk BPKAD, Bapenda, dan BPS wilayah Kota Surabaya. Riset ini turut diperkuat dengan mengacu pada bermacam karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik bahasan.

Proses pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan dan mengkaji berkas laporan keuangan daerah, angka realisasi pajak, serta dokumen-dokumen formal lain yang mendukung studi ini. Informasi yang telah terkumpul selanjutnya diproses sedemikian rupa agar dapat menghasilkan temuan yang selaras dengan target penelitian.

Metode analisis data yang diadopsi adalah kuantitatif deskriptif, yang mana kalkulasi dilakukan demi mengukur persentase sumbangsih pajak pariwisata terhadap total PAD lewat rumus di bawah ini:

$$\text{Kontribusi Pajak} = (\text{Realisasi Pajak Sektor Pariwisata} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%.$$

Kriteria penilaian kontribusi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) 0–10% termasuk kategori sangat rendah,
- b) 10–20% tergolong rendah,
- c) 20–30% berada pada kategori sedang,
- d) 30–40% termasuk cukup tinggi,
- e) dan di atas 40% dikategorikan sangat tinggi.

Hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat kontribusi pajak sektor pariwisata dalam struktur PAD serta perkembangan kontribusinya selama periode penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya 2021-2024

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, realisasi PAD adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2022-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan
2021	4.727.280.629.669,69	-
2022	5.314.695.257.794,40	12,27%
2023	5.771.818.530.452,64	8,60%
2024	6.114.378.907.598,98	5,94%

*sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah*

Data yang tersaji dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya senantiasa mengalami kenaikan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, realisasi PAD tercatat sebesar Rp4,72 triliun. Mengingat periode tersebut bertepatan dengan masa transisi pemulihan pasca-wabah Covid-19, berbagai lini ekonomi lokal terutama di sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata masih berada dalam proses normalisasi dan

belum mampu beroperasi secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada penerimaan daerah yang relatif belum optimal.

Memasuki tahun 2022, PAD meningkat menjadi Rp5,31 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,27% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan meningkatnya mobilitas. Sektor perdagangan, jasa, serta konsumsi masyarakat menunjukkan perbaikan yang signifikan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2023, realisasi PAD kembali mengalami peningkatan menjadi Rp5,77 triliun atau tumbuh sebesar 8,60% dibandingkan tahun 2022. Meskipun persentase pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah semakin stabil. Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai fase konsolidasi, di mana pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih terkendali dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, PAD Kota Surabaya meningkat menjadi Rp6,11 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,94% dibandingkan tahun 2023. Walaupun laju pertumbuhan mengalami perlambatan dibandingkan lonjakan pada tahun 2022, peningkatan ini tetap menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pertumbuhan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa struktur penerimaan daerah semakin kuat dan tidak lagi hanya bergantung pada fase pemulihan pasca pandemi, melainkan telah memasuki tahap pertumbuhan yang lebih matang dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, peningkatan PAD selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Surabaya terus mengalami penguatan dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

#### Perkembangan Pajak Sektor Pariwisata Tahun 2021-2024

Lingkup pajak sektor pariwisata yang dianalisis dalam studi ini mencakup beberapa kategori, yaitu pungutan atas jasa perhotelan, usaha restoran, penyelenggaraan hiburan, reklame, serta layanan parkir.

**Tabel 2. Realisasi Pajak Sektor Pariwisata**

Jenis Pajak	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pajak Hotel	155.324.205.135	287.887.603.319	365.260.778.287	463.341.025.000
Pajak Restoran	331.095.706.042	504.580.397.623	612.751.907.338	742.680.113.000
Pajak Hiburan	14.426.597.248	55.271.519.667	76.758.306.437	88.594.206.000
Pajak Reklame	118.400.763.500	128.285.689.750	142.632.902.050	158.474.321.000
Pajak Parkir	60.253.304.365	80.295.315.799	96.008.121.793	110.048.656.000
Total:	679.500.576.290	1.056.320.526.158	1.293.412.015.905	1.544. miliar

*sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah*

Menilik data pada tabel 2, perolehan pajak dari sektor pariwisata di Kota Surabaya sepanjang kurun waktu 2021 hingga 2024 memperlihatkan grafik kenaikan yang cukup drastis. Di tahun 2021, akumulasi penerimaan dari berbagai jenis pajak pariwisata mulai dari hotel dan restoran hingga parkir dan reklame berada pada angka Rp 679,5 miliar. Nilai ini relatif rendah karena masih dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Aktivitas perhotelan, restoran, serta penyelenggaraan hiburan belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah dari sektor tersebut.

Memasuki tahun 2022, penerimaan pajak sektor pariwisata meningkat signifikan menjadi Rp1,05 triliun atau tumbuh sekitar 55% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan tertinggi terjadi pada pajak hotel yang meningkat sekitar 85%, serta pajak hiburan yang mengalami lonjakan sangat signifikan. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan yang kuat pada sektor pariwisata seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, meningkatnya mobilitas, serta kembali aktifnya kegiatan ekonomi dan sosial. Sektor restoran juga mengalami pertumbuhan pesat karena meningkatnya konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2023, total pajak sektor pariwisata kembali meningkat menjadi Rp1,29 triliun atau tumbuh sekitar 22% dibandingkan tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya, peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Aktivitas hotel, restoran, dan hiburan semakin normal, serta berbagai kegiatan bisnis dan event kota turut mendorong peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya, pada tahun 2024, total penerimaan pajak sektor pariwisata kembali meningkat menjadi sekitar Rp1,54 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya pulih, tetapi juga mengalami penguatan struktur penerimaan. Pajak restoran dan pajak hotel tetap menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok pajak pariwisata. Kenaikan pada tahun 2024 mencerminkan semakin kuatnya daya beli masyarakat, meningkatnya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), serta berkembangnya usaha kuliner dan jasa perhotelan di Kota Surabaya. Secara komprehensif, kenaikan yang terjadi secara kontinyu selama empat tahun tersebut menegaskan posisi krusial industri pariwisata sebagai penopang utama pendapatan lokal sekaligus penguat fondasi keuangan bagi Kota Surabaya.

### Evaluasi Sumbangsih Perpajakan Bidang Pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah

Guna memetakan porsi setoran pajak pariwisata dalam total PAD Kota Surabaya, peneliti menerapkan kalkulasi kontribusi dengan menggunakan formulasi di bawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3.** Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata terhadap PAD

Tahun	Total Pajak Pariwisata (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2021	679.500.576.290	4.727.280.629.669	14,37%
2022	1.056.320.526.158	5.314.695.257.794	19,87%
2023	1.293.412.015.905	5.771.818.530.452	22,41%
2024	1.544.000.000.000	6.114.378.907.598	25,25%

Sumber: Data Realisasi APBD Kota Surabaya (diolah)

Merujuk pada data di Tabel 3, andil pajak dari industri pariwisata bagi perolehan PAD Surabaya tercatat berfluktuasi di rentang 14% hingga 25% sepanjang tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2021, kontribusi tercatat sebesar 14,37%. Angka ini meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 19,87%, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya penerimaan pajak restoran serta hotel. Pada tahun 2023, kontribusi relatif stabil pada angka 22,41% dan di tahun 2024 peningkatan kontribusi mendekati cukup tinggi di angka 25,25%.

Meskipun secara nominal penerimaan pajak sektor pariwisata terus meningkat setiap tahun, persentase kontribusinya terhadap PAD cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan total PAD juga dipengaruhi oleh peningkatan komponen lainnya, seperti pajak daerah non-pariwisata dan retribusi daerah. Dengan kontribusi yang konsisten mendekati 25%, sektor pariwisata dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber penerimaan strategis dalam struktur PAD Kota Surabaya. Sektor ini memiliki karakteristik dinamis dan responsif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga berpotensi terus dioptimalkan dalam jangka menengah dan panjang.

### Analisis Berdasarkan Klasifikasi

**Tabel 4.** Interpretasi Kontribusi Berdasarkan Kriteria

Tahun	Kontribusi	Kategori
2021	14,37%	Rendah
2022	19,87%	Rendah (mendekati sedang)
2023	22,41%	Sedang
2024	25,25%	Sedang (mendekati cukup tinggi)

Merujuk pada data kalkulasi di Tabel 4, terlihat adanya kenaikan yang stabil pada sumbangsih pajak industri pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sepanjang kurun

waktu 2021 hingga 2024. Capaian kontribusi di tahun 2021 masih tergolong minim, yakni 14,37%, sebagai akibat dari efek pandemi Covid-19 yang membatasi operasional di bidang jasa, akomodasi perhotelan, serta sektor hiburan.

Pada tahun 2022, kontribusi tersebut merangkak naik ke angka 19,87%, meski masih berada di level rendah yang mulai menjangkau kategori sedang. Perkembangan ini menandakan membaiknya ekonomi lokal, yang dipicu oleh lonjakan setoran pajak dari hotel dan restoran menyusul kembalinya pergerakan masyarakat serta daya beli publik, selaras dengan prinsip efek pengganda (multiplier effect) di industri pariwisata. Jika dianalisis berdasarkan tahapan perkembangan, periode 2021–2024 dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu pemulihan, pertumbuhan, stabilisasi, dan penguatan. Tahun 2021 merupakan fase pemulihan awal pasca pandemi, di mana kontribusi pajak sektor pariwisata masih rendah akibat terbatasnya mobilitas dan menurunnya aktivitas hotel, restoran, serta hiburan.

Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan seiring pelonggaran pembatasan sosial, meningkatnya okupansi hotel, pertumbuhan usaha kuliner, serta kembali aktifnya berbagai kegiatan dan event. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi daerah yang cukup kuat. Memasuki tahun 2023, kontribusi berada pada kategori sedang dan menunjukkan fase stabilisasi, dengan pajak restoran dan hotel sebagai penyumbang terbesar. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur penerimaan pajak pariwisata di Surabaya sangat dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2024, kontribusi tetap dalam kategori sedang namun semakin mendekati cukup tinggi, menandakan fase penguatan struktur penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin strategis dalam mendukung PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meskipun demikian, optimalisasi tetap diperlukan melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi pemungutan pajak, pengembangan destinasi dan event, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar kontribusi sektor pariwisata dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Hasil kajian mengenai besaran pajak pariwisata bagi PAD Surabaya periode 2021–2024 menyimpulkan bahwa perolehan PAD kota tersebut terus menguat setiap tahunnya. Tercatat realisasi PAD melonjak dari Rp4,72 triliun di tahun 2021 hingga mencapai Rp6,11 triliun pada 2024, di mana tren positif ini mencerminkan penguatan stabilitas fiskal daerah yang kian solid, khususnya dalam fase pemulihan ekonomi setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Kenaikan tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pajak sektor pariwisata yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Total penerimaan pajak sektor pariwisata meningkat dari Rp679,5 miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp1,54 triliun pada tahun 2024. Peningkatan paling besar terjadi pada periode 2021–2022, yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor jasa dan konsumsi. Pajak restoran dan pajak hotel menjadi kontributor terbesar dalam kelompok pajak pariwisata, yang menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi dan perhotelan memiliki peran dominan dalam struktur penerimaan pajak daerah.

Kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap PAD Kota Surabaya juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 kontribusi tercatat sebesar 14,37 persen dan masih tergolong kategori rendah. Pada tahun 2022 kontribusi meningkat menjadi 19,87 persen dan mendekati kategori sedang. Selanjutnya pada tahun 2023 kontribusi mencapai 22,41 persen dan masuk dalam kategori sedang, serta pada tahun 2024 meningkat hingga sekitar 25 persen yang tetap berada dalam kategori sedang namun menunjukkan tren penguatan. Data tersebut mengonfirmasi bahwa industri pariwisata kini memegang posisi yang kian vital dalam komposisi PAD Kota Surabaya.

Secara keseluruhan, studi ini memaparkan bahwa pariwisata adalah salah satu elemen kunci yang menopang otonomi keuangan daerah di tengah sistem desentralisasi. Kenaikan proporsi pajak wisata secara tahunan memberi sinyal bahwa bidang ini mempunyai peluang besar untuk dioptimalkan sebagai mesin pendapatan daerah jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- Biringkanae, A. (2021). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.722>
- Fitri, D. (2014). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2–14.
- Maulana, M. F. L. I. (2022). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011–2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 371–383.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 871–881.
- Ngumar, A. C. (2016). Jurnal mahasiswa STIESIA. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*. \_
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 81–87.
- Riswari, N. E. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017–2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 781.
- Sianturi, A. (2014). Peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 557–563.
- Suryani, Y. (2017). Aktivitas sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 148–154.
- Wahyudi, M. N. T. (2023). Desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran: Tinjauan sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 32–49.